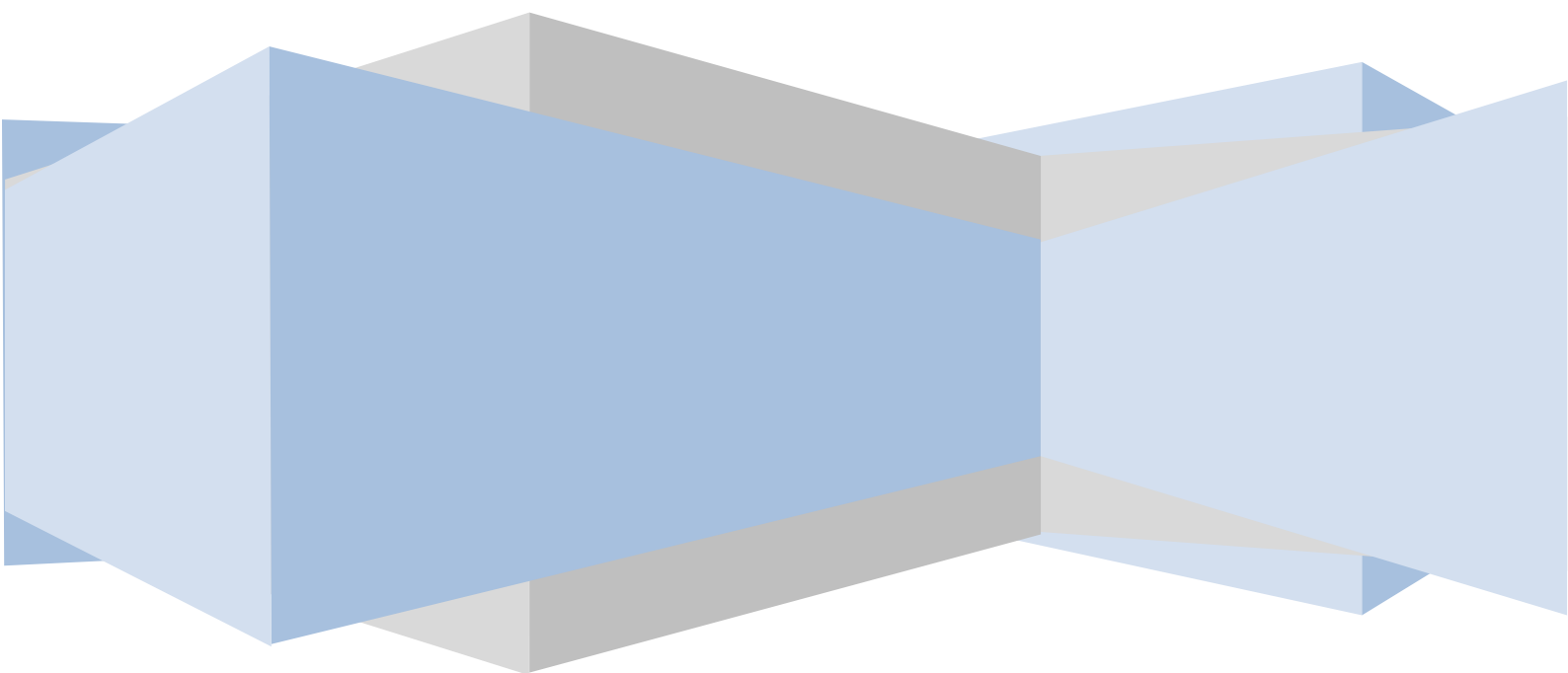


**PENGADILAN TINGGI YOGYAKARTA**  
**LAPORAN KEUANGAN**

**(005.01.400342)**

**Untuk Periode yang Berakhir 31 Desember Tahun 2021**





# **LAPORAN KEUANGAN PENGADILAN TINGGI YOGYAKARTA**

**Untuk Periode yang Berakhir 31 Desember 2021**

**BAGIAN ANGGARAN 005.01**

**BADAN URUSAN ADMINISTRASI**

**MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA**

**Jl. Prof.Dr.Wirjono Prodjodikoro, SH., Wojo, Bangunharjo, Sewon**

**Telp. (0274) 4396412 Fax. (0274) 4396415**

**Bantul - DI Yogyakarta 55187**

**e-mail : [pengadilan\\_tinggi\\_yogyakarta@yahoo.co.id](mailto:pengadilan_tinggi_yogyakarta@yahoo.co.id)**

# *KATA PENGANTAR*

# Kata Pengantar

Sebagaimana diamanatkan Undang-undang RI Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Menteri/Pimpinan Lembaga sebagai Pengguna Anggaran/Barang mempunyai tugas antara lain menyusun dan menyampaikan Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga yang dipimpinnya.

Pengadilan Tinggi Yogyakarta adalah salah satu Entitas Akuntansi di bawah Mahkamah Agung Republik Indonesia yang berkewajiban menyelenggarakan akuntansi dan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dengan menyusun Laporan Keuangan berupa Realisasi Anggaran, Neraca, dan Catatan atas Laporan Keuangan.

Penyusunan Laporan Keuangan Wilayah Pengadilan Tinggi Yogyakarta mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat dalam Pemerintahan. Laporan Keuangan ini telah disusun dan disajikan dengan basis akrual sehingga akan mampu menyajikan informasi keuangan yang transparan, akurat dan akuntabel.

Laporan Keuangan ini diharapkan dapat memberikan informasi yang berguna kepada para pemakai laporan khususnya sebagai sarana untuk meningkatkan akuntabilitas/pertanggungjawaban dan transparansi pengelolaan keuangan negara pada Kantor Pengadilan Tinggi Yogyakarta. Disamping itu, laporan keuangan ini juga dimaksudkan untuk memberikan informasi kepada manajemen dalam pengambilan keputusan dalam usaha untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*).

Yogyakarta, 10 Januari 2022  
Kuasa Pengguna Anggaran,  
Sekretaris,



Drs. MUHIDIN, M.H.  
NIP. 196611251996031001

# *DAFTAR ISI*

# Daftar Isi

---

Kata Pengantar .....	i
Daftar Isi.....	ii
Pernyataan Tanggung Jawab .....	iii
Ringkasan .....	10
I. Laporan Realisasi Anggaran .....	14
II. Neraca .....	16
III. Laporan Operasional.....	19
IV. Laporan Perubahan Ekuitas .....	22
V. Catatan atas Laporan Keuangan.....	24
A. Penjelasan Umum.....	24
A.1. Profil dan Kebijakan Teknis Pengadilan Tinggi Yogyakarta .....	24
A.2. Pendekatan Penyusunan Laporan Keuangan.....	25
A.3. Basis Akuntansi.....	26
A.4. Dasar Pengukuran .....	26
A.5. Kebijakan Akuntansi .....	27
B. Penjelasan atas Pos-pos Realisasi Anggaran .....	34
B.1. Pendapatan Negara dan Hibah .....	36
B.2. Belanja.....	38
C. Penjelasan atas Pos-pos Neraca .....	46
C.1. Aset Lancar .....	46
C.2. Aset Tetap.....	50
C.3. Aset Lainnya .....	57
C.5. Kewajiban Jangka Pendek.....	58
C.6. Ekuitas.....	59
D. Penjelasan atas Pos-pos Laporan Operasional .....	60
D.1. Pendapatan Penerimaan Negara bukan Pajak.....	60

D.2.Beban Pegawai .....	60
D.3.Beban Persediaan .....	61
D.4.Beban Barang dan Jasa .....	62
D.5.Beban Pemeliharaan.....	63
D.6.Beban Perjalanan Dinas .....	64
D.7.Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat .....	65
D.8.Beban Bantuan Sosial.....	61
D.9.Beban Penyusutan dan Amortisasi.....	65
D.10.Beban Penyisihan Piutang tak Tertagih .....	67
D.11.Beban Lain-lain .....	67
D.12.Kegiatan Non Operasional .....	68
D.13.Pos Luar Biasa.....	69
E. Penjelasan atas Pos-pos Laporan Perubahan Ekuitas .....	69
E.1. Ekuitas Awal.....	69
E.2. Surplus (defisit) LO .....	70
E.3. 1. Penyesuaian Nilai Aset .....	70
E.3. 2 Koreksi Nilai Persediaan.....	70
E.3. 3 Selisih Revaluasi Aset Tetap.....	71
E.3. 4 Koreksi Aset Tetap Non Revaluasi .....	71
E.3. 5 Koreksi Lain-lain.....	71
E.4. Transaksi Antar Entitas.....	72
E.4. 1 Diterima dari Entitas Lain (DDEL)/Ditagihkan ke Entitas Lain (DKEL) .....	73
E.3. Ekuitas Akhir .....	74
F. Pengungkapan Penting Lainnya.....	74
F.1. Kejadian-kejadian Penting setelah Tanggal Neraca .....	74
F.2. Pengungkapan Lain-lain .....	74
Daftar dan Lampiran.....	83
Rincian Nilai Perolehan, Akumulasi Penyusutan, dan Nilai Buku Aset Tetap.....	84
Daftar Hibah Langsung .....	90







# *PERNYATAAN TANGGUNGJAWAB*

## Pengadilan Tinggi Yogyakarta

Jl. Prof.Dr.Wirjono Prodjodikoro, SH., Wojo, Bangunharjo, Sewon Bantul D.I.Yogyakarta 55187

Telp. (0274) 4396412 Fax. (0274) 4396415

e-mail : pengadilan\_tinggi\_yogyakarta@yahoo.co.id

### Pernyataan Tanggung Jawab

Laporan Keuangan Pengadilan Tinggi Yogyakarta yang terdiri dari: Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Catatan atas Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2021 sebagaimana terlampir, adalah merupakan tanggung jawab kami.

Laporan Keuangan tersebut telah disusun berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai, dan isinya telah menyajikan informasi pelaksanaan anggaran dan posisi keuangan secara layak sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

Yogyakarta, 10 Januari 2022  
Kuasa Pengguna Anggaran,  
Sekretaris,



Drs. MUHIDIN, M.H.  
NIP. 196611251996031001

# *RINGKASAN*

# Ringkasan

---

Berdasarkan Pasal 55 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 222/PMK.05/2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 177/PMK.05/2015 Tentang Pedoman Penyusunan dan Penyampaian Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga yang meliputi Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Catatan atas Laporan Keuangan kepada Menteri Keuangan selaku pengelola fiskal, dalam rangka penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP).

Laporan Keuangan Pengadilan Tinggi Yogyakarta Tahun Anggaran 2021 ini telah disusun dan disajikan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) dan berdasarkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan, serta berpedoman pada Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 222/PMK.05/2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 177/PMK.05/2015 tentang Pedoman Penyusunan dan Penyampaian Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga. Laporan Keuangan ini meliputi :

## **1. LAPORAN REALISASI ANGGARAN**

Laporan Realisasi Anggaran menggambarkan perbandingan antara anggaran dengan realisasinya, yang mencakup unsur-unsur Pendapatan-LRA dan Belanja selama periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2021.

Realisasi Pendapatan Negara pada TA 2021 adalah berupa Pendapatan Negara Bukan Pajak sebesar Rp. 22,430,727,- atau mencapai 00,00 persen dari estimasi pendapatannya sebesar Rp.0,-.

Realisasi Belanja Negara pada TA 2021 adalah sebesar Rp. 39,899,794,018,- atau mencapai 99,22 persen dari alokasi anggaran sebesar Rp. 40,219,216,000,-.

## 2. NERACA

Neraca menggambarkan posisi keuangan entitas mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas dana per 31 Desember 2021 dan 2020. Nilai Aset per 31 Desember 2021 dicatat dan disajikan sebesar Rp.46,880,700,036,-, yang terdiri dari : Aset Lancar sebesar Rp.54,034,950,- ; Aset Tetap (neto setelah akumulasi penyusutan) sebesar Rp.46,777,105,086,-; Piutang Jangka Panjang (neto setelah penyisihan piutang tak tertagih) sebesar Rp.0,-; dan Aset Lainnya (neto setelah akumulasi penyusutan) sebesar Rp.49,560,000,-.

Nilai Kewajiban dan Ekuitas masing-masing sebesar Rp.33,653,687,- dan Rp.46,847,046,349,-.

## 3. LAPORAN OPERASIONAL

Laporan Operasional menyajikan berbagai unsur pendapatan-LO, beban, surplus/defisit dari operasi, surplus/defisit dari kegiatan nonoperasional, surplus/defisit sebelum pos luar biasa, pos luar biasa, dan surplus/defisit-LO, yang diperlukan untuk penyajian yang wajar. Pendapatan-LO untuk periode sampai dengan 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp.22,430,727,- sedangkan jumlah beban adalah sebesar Rp. 39,127,226,054,- sehingga terdapat surplus(defisit) dari Kegiatan Operasional senilai Rp. (39,104,795,327) Kegiatan Non Operasional dan Pos-Pos Luar Biasa masing-masing surplus sebesar Rp.0,- dan surplus(defisit) sebesar Rp. 0,- sehingga entitas mengalami surplus(defisit) -LO sebesar Rp. (39,104,795,327),-.

#### 4. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Ekuitas pada tanggal 01 Januari 2021 adalah sebesar Rp.46,070,140,285,- dikurangi surplus(defisit)-LO sebesar Rp. (39,104,795,327) kemudian ditambah dengan koreksi-koreksi senilai Rp.0,- dan ditambah Transaksi Antar Entitas sebesar Rp.39,881,701,391,- sehingga Ekuitas entitas pada tanggal 31 Desember 2021 adalah senilai Rp.46,847,046,349,-.

#### 5. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) menyajikan informasi tentang penjelasan atau daftar terinci atau analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas. Termasuk pula dalam CaLK adalah penyajian informasi yang diharuskan dan dianjurkan oleh Standar Akuntansi Pemerintahan serta pengungkapan-pengungkapan lainnya yang diperlukan untuk penyajian yang wajar atas laporan keuangan.

Dalam penyajian Laporan Realisasi Anggaran untuk periode yang berakhir sampai dengan tanggal 31 Desember 2021, disusun dan disajikan berdasarkan basis kas. Sedangkan Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas untuk Tahun 2021 disusun dan disajikan dengan basis akrual.

# *I. LRA PERBANDINGAN*



# I. Laporan Realisasi Anggaran

**PENGADILAN TINGGI YOGYAKARTA**  
**LAPORAN REALISASI ANGGARAN**  
**UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2020 DAN 2021**  
*( dalam satuan Rupiah )*

	Uraian	Catatan	TA 2021			TA 2020
			Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
<b>A.</b>	<b>Pendapatan Negara dan Hibah</b>	<b>B.1</b>				
1.	Penerimaan Negara Bukan Pajak	B.1.1	0	22,430,727	00,00	23,501,050
	<b>Jumlah Pendapatan Negara dan Hibah</b>		<b>0</b>	<b>22,430,727</b>	<b>00,00</b>	<b>23,501,050</b>
<b>B.</b>	<b>Belanja Negara</b>	<b>B.2</b>				
1.	Belanja Pegawai	B.2.1.	35,642,913,000	35,329,931,119	99.13	32,792,843,671
2.	Belanja Barang	B.2.2.	3,098,803,000	3,095,934,839	99.91	3,260,468,009
3.	Belanja Modal	B.2.3.	1,477,500,000	1,473,928,060	100,00	103,840,000
	<b>Jumlah Belanja Negara</b>		<b>40,219,216,000</b>	<b>39,899,794,018</b>	<b>99.22</b>	<b>36,157,151,680</b>

*Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan*

## *II. NERACA PERBANDINGAN*

## II. Neraca

**PENGADILAN TINGGI YOGYAKARTA**  
**NERACA**  
**PER 31 DESEMBER 2021 DAN 2020**  
*(dalam satuan Rupiah)*

URAIAN	Catatan	31 Desember 2021	31 Desember 2020
<b>ASET</b>			
<b>Aset Lancar</b>			
Kas di Bendahara Pengeluaran	C. 1.	0	0
Belanja Dibayar Dimuka (prepaid)	C. 2.	4,950,000	4,773,698
Pendapatan yang Masih Harus Diterima	C. 3.	0	0
Persediaan	C. 4.	49,084,950	12,564,350
<b>Jumlah Aset Lancar</b>		<b>54,034,950</b>	<b>17,338,048</b>
<b>Aset Tetap</b>			
Tanah	C. 5.	33,689,671,000	33,689,671,000
Peralatan dan Mesin	C. 6.	6,202,563,500	6,161,078,400
Gedung dan Bangunan	C. 7.	14,578,591,272	13,142,145,212
Jalan, Irigasi, dan Jaringan	C. 8.	155,789,484	155,789,484
Aset Tetap Lainnya	C. 9.	112,460,482	112,270,482
Konstruksi dalam Pengerjaan	C. 10.	0	0
Akumulasi Penyusutan Aset Tetap	C. 11.	(7,961,970,652)	(7,225,313,131)
<b>Jumlah Aset Tetap</b>		<b>46,777,105,086</b>	<b>46,035,641,447</b>
Aset tak Berwujud	C. 12.	81,737,200	81,737,200
Aset Lain-Lain	C. 13.	174,526,000	174,381,000
Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya	C. 14.	(206,703,200)	(205,884,450)
<b>Jumlah Aset Lainnya</b>		<b>49,560,000</b>	<b>50,233,750</b>

<b>Jumlah Aset</b>		<b>46,880,700,036</b>	<b>46,103,213,245</b>
<b>KEWAJIBAN</b>			
<b>Kewajiban Jangka Pendek</b>			
<b>Uang Muka dari KPPN</b>	<b>C. 15.</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Jumlah Kewajiban Jangka Pendek</b>		<b>33,653,687</b>	<b>33,072,960</b>
<b>Jumlah Kewajiban</b>		<b>33,653,687</b>	<b>33,072,960</b>
<b>EKUITAS</b>			
<b>Ekuitas</b>	<b>C. 16.</b>	<b>46.847,046,349</b>	<b>46,070,140,285</b>
<b>Jumlah Ekuitas Dana</b>		<b>46.847,046,349</b>	<b>46,070,140,285</b>
<b>Jumlah Kewajiban dan Ekuitas Dana</b>		<b>46,880,700,036</b>	<b>46,103,213,245</b>

*\*Silahkan lihat Catatan atas Laporan Keuangan pada Bagian V yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan ini.*

### *III. LAPORAN OPERASIONAL*

### III. Laporan Operasional

**PENGADILAN TINGGI YOGYAKARTA**  
**LAPORAN OPERASIONAL**  
**PER 31 DESEMBER 2021 DAN 2020**  
*(dalam satuan Rupiah)*

URAIAN	Catatan	31 Desember 2021	31 Desember 2020
<b>Kegiatan Operasional</b>			
<b>Pendapatan</b>			
Penerimaan Negara Bukan Pajak	D.1	22,430,727	23,501,050
<b>Jumlah Pendapatan</b>		<b>22,430,727</b>	<b>23,501,050</b>
<b>Beban</b>			
Beban Pegawai	D. 2	35,324,096,142	32,802,099,648
Beban Persediaan	D. 3	89,034,115	99,060,204
Beban Barang dan Jasa	D. 4	2,185,766,243	1,996,191,721
Beban Pemeliharaan	D. 5	604,385,983	943,567,215
Beban Perjalanan Dinas	D. 6	186,467,300	219,896,775
Beban Barang Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat	D. 7	0	0
Beban Bantuan Sosial	D. 8	0	0
Beban Penyusutan dan Amortisasi	D. 9	737,476,271	768,496,010
Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih	D. 10	0	0
<b>Jumlah Beban</b>		<b>39,127,226,054</b>	<b>36,829,311,573</b>
<b>Surplus (Defisit) dari Kegiatan Operasional</b>		<b>(39,104,795,327)</b>	<b>(36,805,810,523)</b>
<b>Kegiatan Non Operasional</b>			
	D. 11		
Surplus Penjualan Aset Non Lancar		0	0
Defisit Penjualan Aset Non Lancar		0	0
Defisit Selisih Kurs		0	0
<b>Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya</b>		<b>0</b>	<b>903,600</b>

<b>Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya</b>	<b>0</b>	<b>1,521,700</b>
<b>Beban dari Kegiatan Non Operasional Lainnya</b>	<b>0</b>	<b>618,100</b>
<b>Surplus (Defisit) dari Kegiatan Non Operasional</b>	<b>0</b>	<b>903,600</b>
<b>Surplus (Defisit) Sebelum Pos Luar Biasa</b>	<b>(39,104,795,327)</b>	<b>(36,804,906,923)</b>
<b>Pos Luar Biasa</b>	<b>D. 12</b>	
<b>Pendapatan PNB</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Beban Perjalanan Dinas</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Beban Persediaan</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Surplus (Defisit) Laporan Operasional</b>	<b>(39,104,795,327)</b>	<b>(36,804,906,923)</b>

*\*Silahkan lihat Catatan atas Laporan Keuangan pada Bagian V yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan ini.*

## *IV. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS*



## IV. Laporan Perubahan Ekuitas

**PENGADILAN TINGGI YOGYAKARTA**  
**LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS**  
**PER 31 DESEMBER 2021 DAN 2020**  
*(dalam satuan Rupiah)*

URAIAN	Catatan	31 Desember 2021	31 Desember 2020
Ekuitas Awal	E. 1	46,070,140,285	46,239,834,257
Surplus (Defisit) Laporan Operasional	E. 2	(39,104,795,327)	(36,804,906,923)
Koreksi yang menambah/mengurangi ekuitas	E. 3	0	493,792,321
Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan Akuntansi / Kesalahan Mendasar	E. 3.1	0	0
Penyesuaian Nilai Aset	E. 3.2	0	0
Koreksi Nilai Persediaan	E. 3.3	0	0
Selisih Revaluasi Aset Tetap	E. 3.4	0	543,555,000
Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi	E. 3.5	0	(43,630,359)
Koreksi Lain-lain	E. 3.6	0	(6,132,320)
<b>Jumlah</b>			<b>493.792.321</b>
Transaksi Antar Entitas	E. 4	39,881,701,391	36,141,420,630
<b>Ekuitas Akhir</b>		<b>46,847,046,349</b>	<b>46,070,140,285</b>

*\*Silahkan lihat Catatan atas Laporan Keuangan pada Bagian V yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan ini.*

# *V. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN*

## V. Catatan atas Laporan Keuangan

### A. Penjelasan Umum

#### A.1. Profil dan Kebijakan Teknis Pengadilan Tinggi Yogyakarta

Visi Pengadilan Tinggi Yogyakarta adalah Visi Mahkamah Agung adalah TERWUJUDNYA BADAN PERADILAN INDONESIA YANG AGUNG, yang bertujuan agar Mahkamah Agung dan Badan Peradilan dibawahnya menjadi lembaga yang dihormati, dimana di dalamnya dikelola oleh hakim dan pegawai yang memiliki kemuliaan dan kebesaran serta keluhuran sikap dan jiwa dalam melaksanakan tugas pokoknya, yaitu memutus perkara.

Misi Pengadilan Tinggi Yogyakarta adalah:

1. Menjaga kemandirian badan peradilan;
2. Memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan kepada pencari keadilan;
3. Meningkatkan kualitas kepemimpinan badan peradilan;
4. Meningkatkan kredibilitas dan transparansi badan peradilan.

Untuk mewujudkan Visi dan Misi tersebut Pengadilan Tinggi Yogyakarta melakukan beberapa langkah-langkah strategis sebagai berikut:

Kebijakan Pengadilan Tinggi Yogyakarta adalah mendukung program reformasi judicial / pembaharuan peradilan yang dilakukan Mahkamah Agung dapat berjalan seperti yang diharapkan. Strategi yang diterapkan sesuai dengan tugas dan fungsi Pengadilan Tinggi Yogyakarta, antara lain :

1. Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum

Dalam program ini ditentukan kebijakan yaitu :

- a. Peningkatan penyelesaian perkara.

Sasaran ini dilihat dengan indikator berupa :

- o Peningkatan prosentase perkara perdata yang diselesaikan,

- Peningkatan prosentase perkara pidana yang diselesaikan,
  - Peningkatan prosentase sisa perkara perdata yang diselesaikan,
  - Peningkatan prosentase sisa perkara pidana yang diselesaikan
- b. Peningkatan tertib administrasi perkara
- Sasaran ini dilihat dengan indikator berupa :
- Peningkatan prosentase berkas perkara perdata yang diajukan banding yang disampaikan secara lengkap,
  - Peningkatan prosentase berkas perkara pidana yang diajukan banding yang disampaikan secara lengkap,
  - Peningkatan prosentase berkas perkara perdata yang yang diregister dan siap didistribusikan ke Majelis,
  - Peningkatan prosentase berkas perkara pidana yang yang diregister dan siap didistribusikan ke Majelis
- c. Peningkatan kualitas SDM
- Sasaran ini dilihat dengan indikator berupa :
- Peningkatan prosentase pegawai yang lulus diklat teknis yudisial
  - Peningkatan prosentase pegawai yang lulus diklat teknis non yudisial
- d. Peningkatan kualitas dalam pelaksanaan pengawasan/pembinaan :
- Sasaran ini dilihat dengan indikator berupa :
- Peningkatan prosentase pengaduan yang ditindak-lanjuti
  - Peningkatan prosentase temuan yang ditindak-lanjuti
2. Program Dukungan manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya;
- Dalam program ini ditentukan kebijakan yaitu peningkatan aksesibilitas masyarakat terhadap peradilan (aces to justice). Sasaran ini dilihat dengan indikator berupa peningkatan prsentase proses penyelesaian perkara-perkara yang dipublikasikan.

## A.2. Pendekatan Penyusunan Laporan Keuangan

---

Laporan Keuangan Tahun 2021 ini merupakan laporan yang mencakup seluruh aspek keuangan yang dikelola oleh Kantor. Laporan Keuangan ini dihasilkan melalui Sistem Akuntansi Instansi (SAI) yaitu serangkaian prosedur manual maupun yang terkomputerisasi mulai dari pengumpulan data, pencatatan dan pengikhtisaran sampai dengan pelaporan posisi keuangan dan operasi keuangan pada Kementerian Negara/Lembaga.

SAI terdiri dari Sistem Akuntansi Instansi Berbasis AkruaI (SAIBA) dan Sistem Informasi Manajemen dan Akuntansi Barang Milik Negara (SIMAK-BMN). SAI dirancang untuk menghasilkan Laporan Keuangan Satuan Kerja yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas. Sedangkan SIMAK-BMN adalah sistem yang menghasilkan informasi aset tetap, persediaan, dan aset lainnya untuk penyusunan neraca dan laporan barang milik negara serta laporan manajerial lainnya.

## A.3. Basis Akuntansi

---

Kantor Pengaduan Tinggi Yogyakarta menerapkan basis akrual dalam penyusunan dan penyajian Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas serta basis kas untuk penyusunan dan penyajian Laporan Realisasi Anggaran. Basis akrual adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa itu terjadi, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayarkan. Sedangkan basis kas adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi atau peristiwa lainnya pada saat kas atau setara kas diterima atau dibayar. Hal ini sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang telah ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

## A.4. Dasar Pengukuran

---

Pengukuran adalah proses penetapan nilai uang untuk mengakui dan memasukkan setiap pos dalam laporan keuangan. Dasar pengukuran yang

diterapkan Kantor dalam penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan adalah dengan menggunakan nilai perolehan historis.

Aset dicatat sebesar pengeluaran/penggunaan sumber daya ekonomi atau sebesar nilai wajar dari imbalan yang diberikan untuk memperoleh aset tersebut. Kewajiban dicatat sebesar nilai wajar sumber daya ekonomi yang digunakan pemerintah untuk memenuhi kewajiban yang bersangkutan.

Pengukuran pos-pos laporan keuangan menggunakan mata uang rupiah. Transaksi yang menggunakan mata uang asing dikonversi terlebih dahulu dan dinyatakan dalam mata uang rupiah.

#### A.5. Kebijakan Akuntansi

Penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan Tahun 2021 telah mengacu pada Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Kebijakan akuntansi merupakan prinsip-prinsip, dasar-dasar, konvensi konvensi, aturan-aturan, dan praktik-praktik spesifik yang dipilih oleh suatu entitas pelaporan dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan. Disamping itu, dalam penyusunannya telah diterapkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan.

Kebijakan-kebijakan akuntansi yang penting yang digunakan dalam penyusunan Laporan Keuangan Kantor Pengadilan Tinggi Yogyakarta adalah sebagai berikut:

##### (1.) Pendapatan LRA

- Pendapatan-LRA diakui pada saat kas diterima pada Kas Umum Negara (KUN).
- Akuntansi pendapatan-LRA dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah nettanya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
- Pendapatan-LRA disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.

## (2.) Pendapatan LO

- Pendapatan-LO adalah hak pemerintah pusat yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali.
- Pendapatan-LO diakui pada saat timbulnya hak atas pendapatan dan /atau Pendapatan direalisasi, yaitu adanya aliran masuk sumber daya ekonomi. Secara khusus pengakuan pendapatan-LO pada Badan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan adalah sebagai berikut:
  - Pendapatan Jasa Pelatihan diakui setelah pelatihan selesai dilaksanakan
  - Pendapatan Sewa Gedung diakui secara proporsional antara nilai dan periode waktu sewa.
  - Pendapatan Denda diakui pada saat dikeluarkannya surat keputusan denda atau dokumen lain yang dipersamakan
- Akuntansi pendapatan-LO dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah netto (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
- Pendapatan disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.

## (3.) Belanja

- Belanja adalah semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Negara yang mengurangi Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah.
- Belanja diakui pada saat terjadi pengeluaran kas dari KUN.
- Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran, pengakuan belanja terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN).

- Belanja disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi akan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

#### (4.) Beban

---

- Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban.
- Beban diakui pada saat timbulnya kewajiban; terjadinya konsumsi aset; terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa.
- Beban disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

#### (5.) Aset

---

Aset diklasifikasikan menjadi Aset Lancar, Investasi, Aset Tetap, Piutang Jangka Panjang dan Aset Lainnya.

##### a. Aset Lancar

---

- Kas disajikan di neraca dengan menggunakan nilai nominal. Kas dalam bentuk valuta asing disajikan di neraca dengan menggunakan kurs tengah BI pada tanggal neraca.
- Investasi Jangka Pendek BLU dalam bentuk surat berharga disajikan sebesar nilai perolehan sedangkan investasi dalam bentuk deposito dicatat sebesar nilai nominal.
- Piutang diakui apabila memenuhi kriteria sebagai berikut:
  - a) Piutang yang timbul dari Tuntutan Perbendaharaan/Ganti Rugi apabila telah timbul hak yang didukung dengan Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak dan/atau telah dikeluarkannya surat keputusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.
  - b) Piutang yang timbul dari perikatan diakui apabila terdapat peristiwa



yang menimbulkan hak tagih dan didukung dengan naskah perjanjian yang menyatakan hak dan kewajiban secara jelas serta jumlahnya bisa diukur dengan andal

- Piutang disajikan dalam neraca pada nilai yang dapat direalisasikan (*net realizable value*). Hal ini diwujudkan dengan membentuk penyisihan piutang tak tertagih. Penyisihan tersebut didasarkan atas kualitas piutang yang ditentukan berdasarkan jatuh tempo dan upaya penagihan yang dilakukan pemerintah. Perhitungan penyisihannya adalah sebagai berikut:

#### Penggolongan Kualitas Piutang

Kualitas Piutang	Uraian	Penyisihan
Lancar	Belum dilakukan pelunasan s.d. tanggal jatuh tempo	0.5%
Kurang Lancar	Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Pertama tidak dilakukan pelunasan	10%
Diragukan	Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Kedua tidak dilakukan pelunasan	50%
Macet	<ol style="list-style-type: none"> <li>Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Ketiga tidak dilakukan pelunasan</li> <li>Piutang telah diserahkan kepada Panitia Urusan Piutang Negara/DJKN</li> </ol>	100%

- Tagihan Penjualan Angsuran (TPA) dan Tuntutan Perbedaharaan/Ganti Rugi (TP/TGR) yang akan jatuh tempo 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca disajikan sebagai Bagian Lancar TP/TGR atau Bagian Lancar TPA.
- Nilai Persediaan dicatat berdasarkan hasil inventarisasi fisik pada tanggal neraca dikalikan dengan:

- harga pembelian terakhir, apabila diperoleh dengan pembelian;
- harga standar apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri;
- harga wajar atau estimasi nilai penjualannya apabila diperoleh dengan cara lainnya.

#### **b. Aset Tetap**

- Aset tetap mencakup seluruh aset berwujud yang dimanfaatkan oleh pemerintah maupun untuk kepentingan publik yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 tahun.
- Nilai Aset tetap disajikan berdasarkan harga perolehan atau harga wajar.
- Pengakuan aset tetap didasarkan pada nilai satuan minimum kapitalisasi sebagai berikut:
  - a) Pengeluaran untuk per satuan peralatan dan mesin dan peralatan olah raga yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);
  - b) Pengeluaran untuk gedung dan bangunan yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
  - c) Pengeluaran yang tidak tercakup dalam batasan nilai minimum kapitalisasi tersebut di atas, diperlakukan sebagai biaya kecuali pengeluaran untuk tanah, jalan/irigasi/jaringan, dan aset tetap lainnya berupa koleksi perpustakaan dan barang bercorak kesenian.
- Aset Tetap yang tidak digunakan dalam kegiatan operasional pemerintah yang disebabkan antara lain karena aus, ketinggalan jaman, tidak sesuai dengan kebutuhan organisasi yang makin berkembang, rusak berat, tidak sesuai dengan rencana umum tata ruang (RUTR), atau masa kegunaannya telah berakhir direklasifikasi ke Aset Lain-Lain pada pos Aset Lainnya.
- Aset tetap yang secara permanen dihentikan penggunaannya, dikeluarkan dari neraca pada saat ada usulan penghapusan dari entitas

sesuai dengan ketentuan perundang-undangan di bidang pengelolaan BMN/BMD.

### c. Penyusunan Aset Tetap

- Penyusutan aset tetap adalah penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat dari suatu aset tetap.
- Penyusutan aset tetap tidak dilakukan terhadap:
  - a. Tanah
  - b. Konstruksi dalam Pengerjaan (KDP)
  - c. Aset Tetap yang dinyatakan hilang berdasarkan dokumen sumber sah atau dalam kondisi rusak berat dan/atau usang yang telah diusulkan kepada Pengelola Barang untuk dilakukan penghapusan
- Penghitungan dan pencatatan Penyusutan Aset Tetap dilakukan setiap akhir semester tanpa memperhitungkan adanya nilai residu.
- Penyusutan Aset Tetap dilakukan dengan menggunakan metode garis lurus yaitu dengan mengalokasikan nilai yang dapat disusutkan dari Aset Tetap secara merata setiap semester selama Masa Manfaat.
- Masa Manfaat Aset Tetap ditentukan dengan berpedoman Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 59/KMK.06/2013 tentang Tabel Masa Manfaat Dalam Rangka Penyusutan Barang Milik Negara berupa Aset Tetap pada Entitas Pemerintah Pusat. Secara umum tabel masa manfaat adalah sebagai berikut:

### Penggolongan Masa Manfaat Aset Tetap

Kelompok Aset Tetap	Masa Manfaat
Peralatan dan Mesin	2 s.d. 20 tahun
Gedung dan Bangunan	10 s.d. 50 tahun
Jalan, Jaringan dan Irigasi	5 s.d 40 tahun
Aset Tetap Lainnya (Alat Musik Modern)	4 tahun

#### d. Piutang Jangka Panjang

- Piutang Jangka Panjang adalah piutang yang diharapkan/dijadwalkan akan diterima dalam jangka waktu lebih dari 12 (dua belas ) bulan setelah tanggal pelaporan.
- Tagihan Penjualan Angsuran (TPA), Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) dinilai berdasarkan nilai nominal dan disajikan sebesar nilai yang dapat direalisasikan

#### e. Aset Lainnya

- Aset Lainnya adalah aset pemerintah selain aset lancar, aset tetap, dan piutang jangka panjang. Termasuk dalam Aset Lainnya adalah aset tak berwujud, tagihan penjualan angsuran yang jatuh tempo lebih dari 12 (dua belas) bulan, aset kerjasama dengan pihak ketiga (kemitraan), dan kas yang dibatasi penggunaannya.
- Aset Tak Berwujud (ATB) disajikan sebesar nilai tercatat neto yaitu sebesar harga perolehan setelah dikurangi akumulasi amortisasi.
- Amortisasi ATB dengan masa manfaat terbatas dilakukan dengan metode garis lurus dan nilai sisa nihil. Sedangkan atas ATB dengan masa manfaat tidak terbatas tidak dilakukan amortisasi.
- Masa Manfaat Aset Tak Berwujud ditentukan dengan berpedoman Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 620/KM.6/2015 tentang Masa Manfaat Dalam Rangka Amortisasi Barang Milik Negara berupa Aset Tak Berwujud pada Entitas Pemerintah Pusat. Secara umum tabel

masa manfaat adalah sebagai berikut:

#### Penggolongan Masa Manfaat Aset Tak Berwujud

Kelompok Aset Tak Berwujud	Masa Manfaat (tahun)
<i>Software</i> Komputer	4
<i>Franchise</i>	5
Lisensi, Hak Paten Sederhana, Merk, Desain Industri, Rahasia Dagang, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu.	10
Hak Ekonomi Lembaga Penyiaran, Paten Biasa, Perlindungan Varietas Tanaman Semusim.	20
Hak Cipta Karya Seni Terapan, Perlindungan Varietas Tanaman Tahunan	25
Hak Cipta atas Ciptaan Gol.II, Hak Ekonomi Pelaku Pertunjukan, Hak Ekonomi Produser Fonogram.	50
Hak Cipta atas Ciptaan Gol.I	70

- Aset Lain-lain berupa aset tetap pemerintah disajikan sebesar nilai buku yaitu harga perolehan dikurangi akumulasi penyusutan.

#### (6.) Kewajiban

- Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah.
- Kewajiban pemerintah diklasifikasikan kedalam kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang.

(1.) Kewajiban Jangka Pendek

(2.) Suatu kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka pendek jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.

(3.) Kewajiban jangka pendek meliputi Utang Kepada Pihak Ketiga,

Belanja yang Masih Harus Dibayar, Pendapatan Diterima di Muka, Bagian Lancar Utang Jangka Panjang, dan Utang Jangka Pendek Lainnya.

(4.) Kewajiban Jangka Panjang

(5.) Kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka panjang jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu lebih dari dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.

- Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal, yaitu sebesar nilai kewajiban pemerintah pada saat pertama kali transaksi berlangsung.

#### **(7.) Ekuitas**

Ekuitas merupakan selisih antara aset dengan kewajiban dalam satu periode. Pengungkapan lebih lanjut dari ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas.

## **B. Penjelasan atas Pos-pos Realisasi Anggaran**

Pada TA 2021, Kantor Pengadilan Tinggi Yogyakarta telah mengadakan revisi Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) sebanyak 11 (sebelas) kali dari DIPA awal. Hal ini disebabkan oleh adanya perubahan kegiatan menyesuaikan kebutuhan, situasi, kondisi pada saat pelaksanaan anggaran dan menyikapi perkembangan situasi pandemi global Virus Corona (Covid-19) yang sedang kita hadapi bersama hingga varian terakhir yang berkembang "omicron".

PAGU awal DIPA- 005.01.2.400342/2021 tanggal 23 November 2021 sebesar Rp.38,650,471,000,-. Pada Revisi ke 11 (sebelas) menjadi sebesar Rp.40,219,216,000,-. Dengan rincian sebagai berikut:

### **DAFTAR REVISI DIPA TA 2021**

URAIAN	TA 2021		PERUBAHAN
	ANGGARAN AWAL	ANGGARAN SETELAH REVISI	
<b>Pendapatan</b>			
Pendapatan Jasa	-	-	-
Pendapatan PNB	0	0	0
<b>Jumlah Pendapatan</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Belanja</b>			
Belanja Pegawai	34,147,874,000	35,626,332,000	1.478.458.000
Belanja Barang	3,025,097,000	3,098,803,000	73.706.000
Belanja Modal	1,477,500,000	1,477,500,000	0
<b>Jumlah</b>	<b>38,650,471,000</b>	<b>40,219,216,000</b>	<b>1.568.745.000</b>

Perubahan Anggaran Belanja menurut sumber dana atau program/kegiatan dapat dilihat sebagai berikut:

Kode	Uraian	Anggaran Semula	Anggaran setelah Revisi
01	Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Mahkamah Agung		
1066	Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Keuangan Badan Urusan Administrasi	37.172.971.000	38.741.716.000
02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung		
1071	Pengadaan Sarana dan Prasarana di Lingkungan Mahkamah Agung	1,477,500,000	1,477,500,000
	<b>JUMLAH</b>	<b>38,650,471,000</b>	<b>40,219,216,000</b>

Pagu Anggaran Belanja khusus pencegahan dan penanganan Virus Corona (COVID-19) sebagai berikut:

Akun	Uraian	Anggaran Semula	Anggaran setelah Revisi
------	--------	-----------------	-------------------------

52	BELANJA BARANG		
5211	Belanja Barang Operasional		
521131	Belanja Barang Operasional - Penanganan Pandemi COVID-19	20,000,000	140,590,000
5212	Belanja Barang Non Operasional		
521241	Belanja Barang Non Operasional - Penanganan Pandemi COVID-19	5,000,000	6,000,000
5218	Belanja Barang Persediaan		
521841	Belanja Barang Persediaan - Penanganan Pandemi COVID-19	5,200,000	18,550,000
5221	Belanja Jasa		
522192	Belanja Jasa - Penanganan Pandemi COVID-19	0	57,970,000
	<b>JUMLAH</b>	<b>30,200,000</b>	<b>223,110,000</b>

Revisi Anggaran dilakukan untuk *Refocusing* belanja pada pencegahan dan penanganan COVID-19 sesuai instruksi Presiden No.4 Tahun 2020 sebagai berikut:

Untuk belanja pegawai tidak dapat dilakukan revisi pengurangan pagu belanja pegawai karena pada TA 2021 terjadi Kenaikan Belanja Pegawai, hal ini karena belanja pegawai untuk Tunjangan Hari Raya (THR) dan Gaji ke-13 dibayarkan kepada seluruh Pegawai Sedangkan pada TA 2020 pembayaran Tunjangan Hari Raya (THR) dan Gaji ke-13 tidak dibayarkan untuk seluruh pegawai (penyesuaian terhadap situasi pandemi Covid-19) sesuai Surat Menteri Keuangan Nomor S-343/MK/02/2020) Yang tidak mendapatkan THR yaitu; Eselon 2 ketas dan Pejabat Negara (Hakim) golongan IVb.

Anggaran awal belanja pegawai sebesar Rp. 34,147,874,000,- setelah direvisi menjadi Rp. 35,626,332,000,- pada TA 2021 terjadi peningkatan Belanja Pegawai sebesar Rp. 1.478.458.000,-.



Sehingga *Refocusing* belanja pegawai sebagai penyesuaian pada kondisi COVID-19 (dasar pembayaran THR TA 2020 Surat Menteri Keuangan Nomor S-343/MK/02/2020) pada TA 2021 tidak dapat dipenuhi.

Pada belanja barang revisi juga dilakukan pada sebagian besar komponen belanja barang, namun revisi yang sangat signifikan seperti pada;

- Belanja langganan listrik semula sebesar Rp.336.000.000,- setelah direvisi menjadi sebesar Rp.298,896,000,- ;
- Belanja langganan telepon semula sebesar Rp.12.000.000,- direvisi menjadi Rp.2,307,000,-;
- Belanja sewa anggaran awal sebesar Rp.745.120.000 setelah revisi menjadi Rp.733,040,000,-;
- Belanja jasa lainnya pagu awal sebesar Rp. 800,000,-; menjadi sebesar Rp.0,-; juga
- Belanja pemeliharaan gedung dan bangunan lainnya dengan pagu awal sebesar Rp. 148,000,000,- setelah direvisi menjadi Rp. 117,142,000,-;
- Belanja pemeliharaan peralatan dan mesin anggaran awal sebesar Rp.272.179.000,- direvisi menjadi Rp. 212,479,000,- ;
- Belanja perjalanan biasa awal sebesar Rp.158.270.000,- menjadi Rp. 99,338,000,-; dan
- Belanja perjalanan dinas paket meeting luar kota pagu awal sebesar Rp.178.200.000,-, setelah revisi menjadi Rp.86.356.000,-

*Refocusing* belanja untuk pencegahan dan penanganan COVID-19 pada Kantor Pengadilan Tinggi Yogyakarta per 31 Desember 2021 didapat dari realokasi revisi anggaran Belanja Belanja Barang dengan sebagai berikut;

- *Refocusing* pagu belanja barang untuk belanja barang operasioanal – Penanganan Pandemi COVID-19 awal sebesar Rp.20.000.000,- setelah *Refocusing* menjadi Rp. 140,590,000,-;
- *Refocusing* juga Pada belanja barang non operasional - Penanganan Pandemi COVID-19 awal sebesar Rp.5.000.000,- menjadi Rp.6.000.000,-;
- Belanja barang persediaan - Penanganan Pandemi COVID-19 awal sebesar Rp.5.200.000,- *Refocusing* menjadi Rp. 18,550,000,-; dan
- pada belanja jasa - Penanganan Pandemi COVID-19 awal sebesar Rp.0,- setelah revisi untuk *Refocusing* menjadi sebesar Rp. 57,970,000,-.

Untuk Anggaran Belanja Modal pada periode Juni TA 2021 belum dilakukan revisi baik penambahan, pengurangan untuk *Refocusing*.

*Realisasi PNBP:*  
Rp. 22,430,727,-

## B.1. Pendapatan Negara dan Hibah

Realisasi Pendapatan Negara dan Hibah untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp. 22,430,727,- atau mencapai 00,0 persen dari estimasi pendapatan yang ditetapkan sebesar Rp.00,0. Keseluruhan Pendapatan Negara dan Hibah yang diterima oleh Pengadilan Tinggi Yogyakarta adalah merupakan Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) Lainnya.

### Rincian Estimasi dan Realisasi PNBP per 31 Desember TA 2021

(dalam satuan Rupiah)

No	Uraian	Estimasi Pendapatan	Realisasi	%
1.	Pend Pendapatan dari Penjualan Peralatan dan Mesin	0	0	0,00
2.	Pend Pendapatan Sewa Tanah, Gedung, dan Bangunan	0	22,430,727	0,00

3.	Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Tahun Anggaran Yang Lalu	0	0	0,00
4.	Penerimaan Kembali Persekot/Uang Muka Gaji	0	0	0,00
	<b>Total Pendapatan</b>	<b>0</b>	<b>22,430,727</b>	<b>0,00</b>

Realisasi Pendapatan Negara dan Hibah untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp.22,430,727,- atau mencapai 00,0 persen dari estimasi pendapatan yang ditetapkan sebesar Rp. 00,0,-

Realisasi Pendapatan Negara dan Hibah TA 2021 mengalami penurunan sebesar Rp. -1.070.323,00,- atau -4,55 persen dibandingkan TA 2020 dengan Realisasi sebesar Rp. 23,501,050,,-. Hal ini disebabkan karena:

1. Tidak terdapat pendapatan dari penjualan Peralatan dan mesin yang merupakan pendapatan lelang inventaris kantor dalam kondisi rusak ;
2. Tidak terdapat pendapatan dari Penerimaan Kembali Persekot/Uang Muka Gaji dan Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Tahun Anggaran Yang Lalu.

Perbandingan realisasi PNBPA TA 2021 dan 2020 disajikan dalam tabel dibawah ini :

**Tabel 1 Perbandingan Realisasi PNBPA per 31 Desember TA 2021 dan 2020**

*(dalam satuan Rupiah)*

No	Uraian	TA 2021	2020	Perubahan	
				Rp	%
1.	Pendapatan dari Penjualan Peralatan dan Mesin	0	0	0	0
2.	Pendapatan Sewa Tanah, Gedung, dan Bangunan	22,430,727	23,501,050	-1.070.323,00	-4,55
3.	Penerimaan Kembali Persekot/Uang Muka Gaji	0	0	0	0
4.	Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Tahun Anggaran Yang Lalu	0	0	0	0

	<b>Total Pendapatan</b>	<b>22,430,727</b>	<b>23,501,050</b>	<b>-1.070.323,00</b>	<b>-4,55</b>
--	-------------------------	-------------------	-------------------	----------------------	--------------

## B.2. Belanja

*Realisasi Belanja Negara : Rp 39,899,794,018,-*

Realisasi Belanja Negara Pengadilan Tinggi Yogyakarta per 31 Desember TA 2021 adalah sebesar Rp.39,899,794,018,- setelah dikurangi pengembalian belanja, atau sebesar 99.22 % dari anggaran senilai Rp.40,219,216,000,-.

Rincian anggaran dan realisasi belanja pada TA 2021 dapat dilihat pada tabel berikut ini :

### Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja per 31 Desember TA 2021

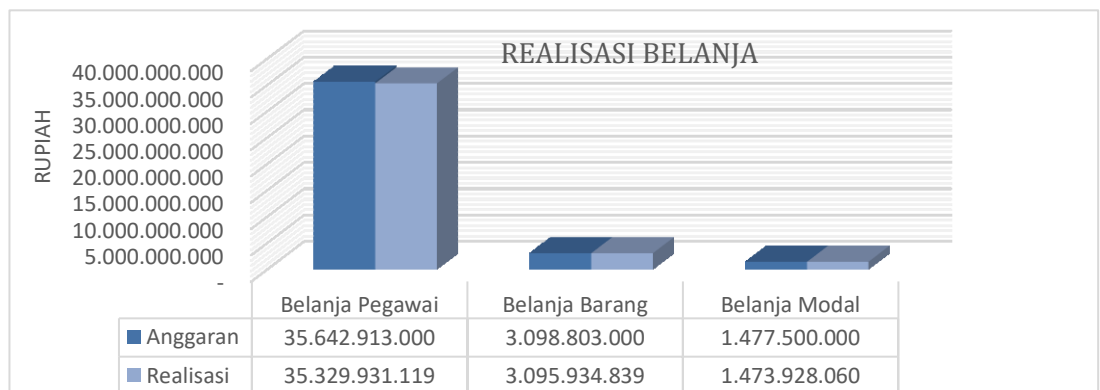
*(dalam satuan Rupiah)*

Uraian	31 Desember TA 2021		
	Pagu	Realisasi	%
Belanja Pegawai	35,642,913,000	35,329,931,119	99.13
Belanja Barang	3,098,803,000	3,095,934,839	99.91
Belanja Modal	1,477,500,000	1,473,928,060	100,00
<b>Total Belanja Bruto</b>	<b>40,219,216,000</b>	<b>39,907,289,750</b>	<b>99.94</b>
Pengembalian Belanja	0	7,495,732	0
<b>Total Belanja Netto</b>	<b>40,219,216,000</b>	<b>39,899,794,018</b>	<b>99.22</b>

Komposisi anggaran dan realisasi belanja dapat dilihat pada tabel berikut ini :

### Komposisi Anggaran dan Realisasi Belanja per 31 Desember TA 2021

*(dalam satuan Rupiah)*



*Sumber: Laporan Keuangan Sistem Akuntansi Kuasa Pengguna Anggaran (SAKPA) 2021*

Realisasi Belanja Negara Pengadilan Tinggi Yogyakarta per 31 Desember TA 2021 adalah sebesar Rp. 39,899,794,018,- setelah dikurangi pengembalian belanja, atau sebesar 99.22 persen dari anggaran senilai Rp. 40,219,216,000,-.

Realisasi Belanja Negara mengalami peningkatan sebesar Rp.3.742.642.338,- atau sebesar 10,35 persen dari realisasi tahun lalu pada periode yang sama. Peningkatan Realisasi Belanja tersebut disebabkan karena:

1. Kenaikan Belanja Pegawai pada TA 2021 karena pembayaran belanja pegawai untuk Tunjangan Hari Raya dan gaji ke-13 dibyarkan untuk seluruh Pegawai. Sedangkan pada TA 2020 pembayaran Tunjangan Hari Raya (THR) dan Gaji ke-13 tidak dibayarkan pada seluruh pegawai sebagai penyesuaian terhadap situasi pandemi Covid-19 sebagaimana Surat Menteri Keuangan Nomor S-343/MK/02/2020) perihal penyampaian Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) tentang pemberian THR bagi PNS, Prajurit TNI, Anggota Polri, Pegawai Non PNS, dan penerima Pensiun atau Tunjangan. Yang tidak mendapatkan THR yaitu; Eselon 2 ketas dan Pejabat Negara (Hakim) golongan IVb.
2. Terdapat Mutasi masuk Hakim dan Panitera Pengganti (PP) dan Penambahan Orang Hakim Adhock Tipikor, pada TA sebelumnya ( TA 2020) hanya terdapat 2 Hakim Adhoc Tipikor, per 30 Juni 2021 menjadi 4 Hakim Adhock Tipikor.
3. Pembayaran Uang Kehormatan Hakim Ad hoc yang telah selesai masa tugasnya selama 2 kali periode (sehingga dibayarkan uang kehormatannya).
4. Meningkatnya Belanja Penanganan Pandemi Covid-19.
5. Peningkatan pada Belanja Modal untuk belanja penambahan nilai gedung dan bangunan (penambahan 2 ruang kerja dan penggantian keramik tembok gedung “pemasangan ACP”).

Perbandingan realisasi belanja TA 2021 dan 2020 dapat dilihat pada tabel berikut:

**Perbandingan Realisasi Belanja per 31 Desember TA 2021 dan TA 2020**

(dalam satuan Rupiah)

Uraian	TA 2021	TA 2020	Perubahan (Naik/Turun)	
			Rp	%
Belanja Pegawai	35,329,931,119	32,792,843,671	2.537.087.448	7,74
Belanja Barang	3,095,934,839	3,260,468,009	-164.533.170	-5,05
Belanja Modal	1,473,928,060	103,840,000	1.370.088.060	1319,42
<b>Total Belanja</b>	<b>39,899,794,018</b>	<b>36,157,151,680</b>	<b>3.742.642.338</b>	<b>10,35</b>

**B.2.1. Belanja Pegawai**

*Realisasi Belanja Pegawai :*  
Rp.35,329,931,119

Realisasi Belanja Pegawai Pengadilan Tinggi Yogyakarta per 31 Desember TA 2021 dan TA 2020 adalah sebesar Rp. 35,329,931,119,- dan Rp. 32,792,843,671,-.

Realisasi Belanja Pegawai TA 2021 mengalami peningkatan sebesar 7,74 persen dibandingkan Realisasi Belanja Pegawai TA 2020. Hal ini disebabkan antara lain:

1. Perubahan Pembayaran THR Tahun Anggaran 2020 disesuaikan dengan Kondisi Pandemi Covid-19 (yang mendapatkan THR hanyalah PNS level eselon III ke bawah, itu pun besarnya tak penuh sebagaimana tahun-tahun sebelumnya. Sedangkan eselon I, II, serta pejabat lainnya tidak mendapatkan THR).
2. Terdapat beberapa Pegawai yang sudah memasuki Purna Tugas /pensiun (khususnya Hakim).
3. Terdapat Mutasi masuk Hakim dan Panitera Pengganti (PP) dan Penambahan Orang Hakim Adhock Tipikor, pada TA sebelumnya (TA 2021)

hanya terdapat 2 Hakim Ad hoc Tipikor, per 30 Juni 2021 menjadi 4 Hakim Adhock Tipikor.

4. Pembayaran Uang Kehormatan Hakim Ad hoc yang telah selesai masa tugas selama 2 kali periode (sehingga dibayarkan uang kehormatannya).

Rincian Belanja Pegawai dapat dilihat pada tabel di bawah:

#### Perbandingan Belanja Pegawai per 31 Desember TA 2021 dan TA 2020

(dalam satuan Rupiah)

Uraian	Beban Pegawai		Perubahan	
	TA 2021	TA 2020	Naik (turun)	%
Belanja Gaji Pokok PNS	7,880,463,280	7,657,324,640	223.138.640	2,91
Belanja Pembulatan Gaji PNS	84,478	76,715	7.763	10,12
Belanja Tunj. Suami/Istri PNS	641,466,200	609,502,044	31.964.156	5,24
Belanja Tunj. Anak PNS	85,778,956	90,800,926	-5.021.970	-5,53
Belanja Tunj. Struktural PNS	93,690,000	73,620,000	20.070.000	27,26
Belanja Tunj. Fungsional PNS	20,049,350,000	18,735,000,000	1.314.350.000	7,02
Belanja Tunj. PPh PNS	3,870,681,762	3,482,337,525	388.344.237	11,15
Belanja Tunj. Beras PNS	285,769,320	248,473,020	37.296.300	15,0
Belanja Uang Makan PNS	1,043,534,000	1,033,903,000	9.631.000	0,93
Belanja Tunjangan Umum PNS	66,490,000	77,260,000	-10.770.000	-13,94
Belanja Tunjangan Hakim Ad Hoc	1,300,000,000	825,000,000	475.000.000	57,58
Belanja Uang Lembur	0	0	0	0,00
Belanja Tunjangan PPH Pejabat Negara	16,580,355	0	16.580.355	100,00
<b>Jumlah</b>	<b>35,317,307,996</b>	<b>32,833,297,870</b>	<b>2.484.010.126</b>	<b>7,57</b>
Pengembalian Belanja	3,957,232	40,454,199	-36.496.967	-90,22
<b>Total Belanja Pegawai</b>	<b>35,313,350,764</b>	<b>32,792,843,671</b>	<b>2.520.507.093</b>	<b>7,69</b>

#### B.2.2. Belanja Barang

Realisasi Belanja  
Barang : Rp.  
3,095,934,839

Realisasi Belanja Barang Pengadilan Tinggi Yogyakarta per 31 Desember TA 2021 dan TA 2020 adalah sebesar Rp. 3,095,934,839,- dan 3,260,468,009,-.

Realisasi Belanja Barang TA 2021 mengalami penurunan sebesar (Rp.164.533.170,-) atau -5,05 persen dibandingkan Realisasi Belanja Barang TA 2020. Hal ini disebabkan antara lain:

1. Belanja Barang Non Operasional - Penanganan Pandemi, Belanja Pemeliharaan, dan Belanja Perjalanan Dinas mengalami penurunan.
2. Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting luar kota karena kegiatan-kegiatan yang masih beresiko Covid-19 dikurangi.

Rincian Belanja Barang dapat dilihat pada tabel berikut:

**Perbandingan Belanja Barang per 31 Desember TA 2021 dan TA 2020**

(dalam satuan Rupiah)

Uraian	Realisasi		Perubahan (naik/turun)	
	TA 2021	TA 2020	Rp	%
Belanja Barang Operasional	1,045,732,828	891,957,327	153.775.501	17,24
Belanja Barang Non Operasional	25,309,570	168.604.440	-143.294.870	-84,99
Belanja Jasa	1,108,484,443	1,063,032,387	45.452.056	4,28
Belanja Pemeliharaan	579,458,269	916.977.080	-337.518.811	-36,81
Belanja Perjalanan Dinas	186,467,300	219,896,775	-33.429.475	-15,20
<b>Total Belanja Brutto</b>	<b>3,095,934,839</b>	<b>3,260,468,009</b>	<b>-164.533.170</b>	<b>-5,05</b>
Pengembalian Belanja	0	0	0	0,00
<b>Total Belanja Netto</b>	<b>3,095,934,839</b>	<b>3,260,468,009</b>	<b>-164.533.170</b>	<b>-5,05</b>

**B.2.2.1 Belanja COVID-19**

Realisasi Anggaran Khusus penanganan pandemi Covid-19 pada TA 2021 Pengadilan Tinggi Yogyakarta mengalokasikan anggaran awal untuk penanganan pandemi COVID-19 sebesar Rp. 30,200,000,-. Setelah *refocusing* pagu anggran penanganan pandemi COVID-19 menjadi sebesar



Rp. 223,110,000,- dengan realisasi mencapai Rp. 223,052,008,- atau 99.97 persen rincian sebagai berikut:

**Realisasi Anggaran Belanja dalam rangka Covid-19 per 31 Desember TA 2021**

(dalam satuan Rupiah)

Akun	Uraian	Anggaran		Realisasi	
		Semula	Revisi	Rp	%
52	BELANJA BARANG				
5211	<b>Belanja Barang Operasional</b>				
521131	Belanja Barang Operasional - Penanganan Pandemi COVID-19	20,000,000	140,590,000	140,580,565	99.99
5212	<b>Belanja Barang Non Operasional</b>				
521241	Belanja Barang Non Operasional - Penanganan Pandemi COVID-19	5,000,000	5,000,000	5,000,000	100.00
5218	<b>Belanja Barang Persediaan</b>				
521841	Belanja Barang Persediaan - Penanganan Pandemi COVID-19	5,200,000	18,550,000	18,540,043	99.95
5221	<b>Belanja Jasa</b>				
522192	Belanja Jasa - Penanganan Pandemi COVID-19	0	57,970,000	57,931,400	99.93
	<b>JUMLAH</b>	<b>30,200,000</b>	<b>223,110,000</b>	<b>223,052,008</b>	<b>99.97</b>

**B.2.3. Belanja Modal;**

*Realisasi Belanja Modal :Rp. 1,473,928,060*

Realisasi Belanja Modal Pengadilan Tinggi Yogyakarta per 31 Desember TA 2021 dan TA 2020 adalah sebesar Rp. 1,473,928,060,- dan Rp.103,840,000,-.

Realisasi Belanja Modal TA 2021 mengalami peningkatan sebesar Rp 1.370.088.060.- atau 1319,42 persen dibandingkan Realisasi Belanja Modal TA 2020, Realisasi Belanja Modal mengalami peningkatan. Hal ini disebabkan ;

1. Peningkatan pada Belanja Modal untuk belanja penambahan nilai gedung dan bangunan (penambahan 2 ruang kerja dan penggantian keramik tembok gedung-pemasangan ACP).

Rincian Belanja Modal dapat dilihat pada tabel di bawah :

**Perbandingan Belanja Modal per 31 Desember TA 2021 dan TA 2020**

*(dalam satuan Rupiah)*

Uraian	Realisasi		Perubahan (naik/turun)	
	TA 2021	TA 2020	Rp	%
Belanja Modal Tanah	0	0	0	0,00
Belanja Modal Peralatan & Mesin	37,482,000	25,000,000	12.482.000	49,93
Belanja Modal Gedung & Bangunan	1,439,984,560	78,840,000	1.361.144.560	1726,46
Belanja Modal Lainnya	0	0	0	0,00
Total Belanja Brutto	1,439,984,560	103,840,000	1.336.144.560	1286,73
Pengembalian Belanja	3,538,500	0	3.538.500	100,00
<b>Total Belanja Netto</b>	<b>1,473,928,060</b>	<b>103,840,000</b>	<b>1.370.088.060</b>	<b>1319,42</b>

**B.2.3.1 Belanja Modal Tanah**

*Belanja Modal Tanah Rp.0,-*

Pada Satuan Kerja Pengadilan Tinggi Yogyakarta tidak terdapat Belanja Modal Tanah baik pada TA 2021 maupun pada TA 2020.

**B.2.3.2 Belanja Modal Peralatan dan Mesin**

*Belanja Modal Peralatan dan Mesin Rp. 37,482,000,-*

Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin per 31 Desember TA 2021 dan TA 2020 adalah sebesar Rp. 37,482,000 dan Rp. 25,000,000,- mengalami

peningkatan sebesar Rp. 12.482.000,- atau 49,93 persen bila dibandingkan dengan realisasi TA 2020 sebesar Rp. 25.000,000,-. Hal ini disebabkan Karena;

1. Pada periode TA 2021 belanja modal peralatan dan mesin meningkat karena kebutuhan terhadap peralatan dan mesin meningkat.
2. Meningkatkan belanja modal peralatan dan mesin sebagai penyesuaian terhadap penambahan jumlah (mutasi masuk) Hakim dan Panitera Pengganti sehingga membutuhkan tambahan peralatan.

Rincian Belanja Modal Peralatan dan Mesin dapat dilihat pada tabel di bawah

:

**Perbandingan Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin TA 2021 dan 2020**

*(dalam satuan Rupiah)*

Uraian	Realisasi		Perubahan (Naik/turun)	
	TA 2021	TA 2020	Rp	%
Almari Arsip		0		
Lemari untuk Toga Hakim		0		
AC Split		0		
Komputer HP Desktop		25.000.000		
Laptop		0		
Printer		0		
Router		0		
Scanner		0		
Mesin Fingerprint		0		
Meja Kerja		0		
Kursi Metal		0		
Perbaikan Genset		0		
Meja Hakim Tinggi		0		
Kursi Hakim Tinggi		0		
Wireless Access Point		0		
Filling Cabinet		0		
Kulkas		0		
Meja Proyektor		0		
Mic Wireless		0		
TV LED		0		

Faksimile	0
Hand Scanner	0
LCD Proyektor	0
HD Eksternal	0
HT	0
Radio RIG	0
CCTV	0
Back UPS	0
Camera Digital	0
Meja Komputer	0
Kursi Putar	0
Pengembangan Server (penambahan nilai)	0
Pompa Air	0
Switch	0
<b>Jumlah Belanja</b>	<b>25.000.000</b>

### B.2.3.3 Belanja Modal Gedung dan Bangunan

*Belanja Modal  
Gedung dan  
Bangunan*  
Rp.  
1,439,984,560,-

Realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan (Belanja Penambahan Nilai Gedung dan Bangunan) pada TA 2021 dan TA 2020 adalah masing-masing sebesar Rp. 1,439,984,560,- dan Rp.78,840,000,-.

Untuk Belanja TA 2021 mengalami Kenaikan sebesar Rp. 1.357.606.060,- atau 1721,98 dibandingkan Realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan (Belanja Penambahan Nilai Gedung dan Bangunan) pada TA 2020.

Realisasi Belanja Modal pada periode 31 Desember TA 2021.

**Perbandingan Belanja Modal Gedung dan Bangunan per 31 Desember TA 2021 dan TA 2020**  
(dalam satuan Rupiah)

Uraian	Realisasi		Perubahan (naik/turun)	
	TA 2021	TA 2020	Rp	%
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	0	0	0	0,00
Belanja Penambahan Nilai Gedung dan Bangunan	1,439,984,560	78,840,000	1.361.144.560	1726,46
Total Belanja Brutto	1,439,984,560	78,840,000	1.361.144.560	1726,46
Pengembalian Belanja	3,538,500	0	3.538.500	100,00
<b>Total Belanja Netto</b>	<b>1,436,446,060</b>	<b>78,840,000</b>	<b>1.357.606.060</b>	<b>1721,98</b>

#### B.2.3.4 Belanja Modal Jalan, Irigasi, dan Jaringan

*Belanja Modal Jalan, Irigasi, dan Jaringan*  
Rp.0,-

Pada Satuan Kerja Pengadilan Tinggi Yogyakarta tidak terdapat Belanja Modal Jalan, Irigasi, dan Jaringan baik pada TA 2021 maupun pada TA 2020.

#### B.2.3.5 Belanja Modal Lainnya

*Belanja Modal Lainnya* Rp.0,-

Pada Satuan Kerja Pengadilan Tinggi Yogyakarta tidak terdapat Belanja Modal Lainnya pada TA 2021 maupun pada TA 2020.

## C. Penjelasan atas Pos-pos Neraca

### Aset Lancar

*Aset Lancar: Rp.*  
54,034,950,-

Nilai Aset Lancar per 31 Desember 2021 dan 2020 adalah masing-masing sebesar Rp. 54,034,950,- dan Rp. 17,338,048,-.

Aset lancar merupakan aset yang diharapkan segera untuk dapat direalisasikan atau dimiliki untuk dipakai atau dijual dalam waktu 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan.

Rincian Aset Lancar pada Pengadilan Tinggi Yogyakarta per 31 Desember 2021 dan 2020 disajikan pada tabel di bawah:

#### Rincian Aset Lancar per 31 Desember 2021 dan 2020

(dalam satuan Rupiah)

No	Uraian	TA 2021	TA 2020
	Belanja Dibayar di Muka	4,950,000	4,773,698
	Persediaan	49,084,950	12,564,350
	<b>Total Aset Lancar</b>	<b>54,034,950</b>	<b>17,338,048</b>

### C.1. Kas di Bendahara Pengeluaran

*Kas di Bendahara Pengeluaran:*  
Rp. 0,-

Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran per 31 Desember 2021 dan 2020 masing-masing adalah sebesar Rp. 0,- dan Rp. 0,- yang merupakan kas yang dikuasai, dikelola dan dibawah tanggungjawab Bendahara Pengeluaran yang berasal dari Uang Persediaan yang belum dipertanggungjawabkan atau disetorkan kembali ke kas negara per tanggal neraca.

Rincian Kas di Bendahara Pengeluaran disajikan dalam tabel di bawah :

**Rincian Kas di Bendahara Pengeluaran**  
(dalam satuan Rupiah)

No.	Jenis	31 Desember TA 2021	31 Desember TA 2020
1	Kas di Bendahara Pengeluaran	0	0
	<b>Jumlah</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

### C.2. Belanja Dibayar di Muka

*Belanja Dibayar di Muka:* Rp. 4,950,000,-

Belanja Dibayar di Muka per 31 Desember 2021 dan 2020 masing-masing adalah sebesar Rp. 4,950,000,- dan Rp.4,773,698,-.

Belanja dibayar di muka merupakan hak yang masih harus diterima dari pihak ketiga setelah tanggal neraca sebagai akibat dari telah dibayarkannya secara penuh belanja dan membebani anggaran tahun anggaran berjalan namun barang atau jasa belum diterima.

**Rincian Belanja Dibayar di Muka**  
(dalam satuan Rupiah)

No.	Jenis	31 Desember TA 2021	31 Desember TA 2020
1	Persekot/Uang Muka Gaji	0	0
2	Sewa Rumah Hakim Ad Hoc	0	0
3	Sewa Hosting & Domain	4,950,000	4,773,698
	Jumlah	4,950,000	4,773,698

Saldo Belanja Dibayar di Muka per tanggal 31 Desember 2021 dan 2020 masing-masing adalah sebesar Rp. 4,950,000,- dan Rp. 4,773,698,-.

Belanja Dibayar di Muka merupakan hak yang masih harus diterima setelah tanggal neraca sebagai akibat dari barang/jasa telah dibayarkan secara penuh namun barang atau jasa belum diterima seluruhnya. Rincian Belanja Dibayar di Muka adalah sebagai berikut:

1. Persekot/Uang Muka Gaji sebesar Rp. 0,-
2. Sewa Rumah untuk Hakim Adhoc sebesar Rp.0,-
3. Sewa Hosting dan Domain Rp. 4,773,698,-

### C.3. Persediaan

*Persediaan: Rp.  
49,084,950,-*

Persediaan per 31 Desember 2021 dan 2020 masing-masing adalah sebesar Rp.49,084,950,- dan Rp.12,564,350,-. Persediaan merupakan jenis aset dalam bentuk barang atau perlengkapan (supplies) pada tanggal neraca yang diperoleh dengan maksud untuk mendukung kegiatan operasional dan untuk dijual, dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.

Rincian Persediaan per 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 adalah sebagai berikut:

**Persediaan per 31 Desember TA 2021 dan 31 Desember 2020**

*(dalam satuan Rupiah)*

No.	Uraian	31 Desember 2021	31 Desember 2020
1	Barang Konsumsi	46,393,450	12,564,350
2	Amunisi		0
3	Bahan Untuk Pemeliharaan	2,691,500	0
4	Suku Cadang	0	0
5	Pita Cukai, Materai dan Leges	0	0
6	Aset Tetap atau Persediaan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat	0	0
7	Bahan Baku	0	0
8	Barang dalam Proses	0	0
9	Persediaan untuk Tujuan Strategis	0	0
10	Persediaan Barang Hasil Sitaan	0	0
11	Persediaan lainnya	0	0
	<b>Total</b>	<b>49,084,950</b>	<b>12,564,350</b>





